

PENGUATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MADRASAH ALIYAH DI KUDUS

Ihsan

IAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
ihsan_dr12@yahoo.co.id

Abstract

THE STRENGTHENING OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION AT ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL IN KUDUS. This study aims to analyze the management model of Madrasah Aliyah which is in line with the expectations and challenges faced by madrasahs. Methodologically, this study is focused on three different aspects of madrasah as an educational institution, i.e. (1) institutional, (2) managerial, and (3) curriculum and instructional program. The technique of collecting and analyzing this research was Post-positivism-Phenomenology. Theoretically, targets and research data are believed to be more compatible with qualitative approach. The result shows that Islamic boarding-based madrasahs in Kudus are classified into three different models. They are (1) Pesantren madrasah, (2) Pesantren Environment Madrasah, (3) Pesantren Values System Pesantren. It is suggested that the madrasah should choose either one of the three which suits best to their contexts and capacities.

Keywords: *reinforcing, education, Islamic religion, Madrasah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model manajemen Madrasah Aliyah yang sesuai dengan harapan dan tantangan yang dihadapi oleh madrasah. Secara metodologis, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek yang berbeda dari madrasah sebagai

lembaga pendidikan, yaitu (1) kelembagaan, (2) manajerial, dan (3) kurikulum dan program pengajaran. Teknik pengumpulan dan analisis penelitian ini adalah Post-positivisme-Fenomenologi. Secara teoritis, target dan data penelitian diyakini lebih kompatibel dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa madrasah berbasis pesantren di Kudus diklasifikasikan menjadi tiga model yang berbeda. Di antaranya yaitu (1) Madrasah Pesantren, (2) Madrasah Lingkungan Pesantren, (3) Sistem Nilai Pesantren Pesantren. Hal ini dianjurkan agar madrasah memilih salah satu dari tiga yang paling sesuai dengan konteks dan kapasitas mereka.

Kata kunci: penguatan, pendidikan, agama Islam, Madrasah

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam merupakan upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak seseorang lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, agar terbentuk suatu pribadi yang lebih sempurna, baik itu yang berkaitan dengan perbuatan, akal, perasaan maupun perbuatan (SM., 2011, p. 35). Pendidikan Islam juga merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup (Mulyasa, 2005, p. 130)

Pesantren dan madrasah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan Islam di Indonesia. Masing-masing lembaga pendidikan tersebut telah diatur dan diakui oleh pemerintah dalam undang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pesantren ditetapkan sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan keagamaan (Pasal 30 ayat 4). Sedangkan madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai jenjang pendidikan dasar dan menengah (Pasal 17 dan 18). Oleh karenanya sebelum membahas sistem madrasah, alangkah baiknya diuraikan terlebih dahulu sistem pendidikan pesantren.

Menurut K.H. MA. Sahal Mahfudz pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang sekurang-kurangnya memiliki unsur-unsur kiai atau ustadz, yang mengajar dan mendidik, santri yang belajar pada kiai atau ustadz, masjid sebagai tempat ibadah

dan penyelenggaraan pendidikan, pondok sebagai tempat tinggal santri, kitab-kitab Islam sebagai sumber kajian, manajemen, dan pesantren sebagai sebuah sistem.” *Stressing* dan fokus penting yang perlu dicermati pada definisi KH. MA. Sahal Mahfudz adalah bahwa pesantren sebagai sistem, menjadi sumbu utama dan dinamika sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Islam. Bahkan, pesantren telah membentuk suatu sub kultur baru, yang secara sosiologis-antropologis dapat dikatakan sebagai masyarakat pesantren. Elaborasi lebih jauh terhadap pernyataan ini adalah bahwa apa yang disebut pesantren di sana bukan semata-mata wujud fisik tempat belajar agama, dengan perangkat bangunan, kitab kuning, santri dan kiaiinya, akan tetapi juga masyarakat luas yang tinggal di sekelilingnya dan membentuk pola hubungan budaya, sosial dan keagamaan. Ada hal yang menonjol sebagai ciri khas yang dimiliki oleh pesantren tradisional, yaitu hanya memberikan pelajaran agama versi kitab-kitab Islam klasik berbahasa Arab, teknik pengajaran dengan metode *sorogan dan bandongan* atau *weton*, selain kedua metode tersebut, Mastuhu menyebut hafalan dan halaqah. (Mastuhu, 1994, p. 61) Sistem madrasah dan klasikal diterapkan untuk mempermudah teknik pengajaran sebagai pengembangan *sorogan dan bandongan*, bukan berarti metode *sorogan dan bandongan* semakin tidak efektif. Sebaliknya metode tersebut secara dedaktik-metodik dalam konteks pencapaian hasil belajar terbukti memiliki efektifitas dan signifikansi yang tinggi. Karena sistem ini memungkinkan seorang kiai atau ustadz untuk mengawasi, menilai dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang santri dalam menguasai materi. Sedangkan efektifitas sistem *bandongan* terletak pada keperluan praktis pencapaian kuantitas dan percepatan kajian kitab. Selain itu, juga untuk tujuan kedekatan relasi santri dan kiai atau santri dan ustadznya. Tentu tidak menutup mata, bahwa setiap metode memiliki kelemahan dan kekurangan. (Dhofier, 1990, p. 50)

Adapun madrasah merupakan bentuk modernisasi dari pendidikan pesantren, lembaga ini juga memiliki peranan yang besar dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Zakiyah Daradjat menyatakan bahwa kebangkitan madrasah

merupakan awal dari bentuk pelembagaan pendidikan Islam secara formal (Daradjat, 1999, p. vii).

Di dunia pesantren terkenal adanya unsur-unsur pokok dari pesantren, yaitu kyai, santri, pondok, masjid dan pengajaran mata pelajaran agama Islam. Pada sistem madrasah tidak harus ada pondok, masjid, dan pengajian kitab-kitab klasik. Unsur-unsur yang diutamakan di madrasah adalah pimpinan, guru, siswa, perangkat keras, perangkat lunak dan pengajaran mata pelajaran agama Islam (Daulay, 2001, p. 59).

Ditinjau dari segi jenis madrasah berdasarkan kurikulumnya dapat dibagi menjadi tiga jenis. *Pertama*, Madrasah Diniyah. *Kedua*, Madrasah dan *ketiga*, Madrasah Keagamaan. Madrasah Diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama (diniyah). Madrasah ini dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan agama yang disediakan bagi siswa yang belajar di sekolah umum. Madrasah ini terbagi menjadi tiga jenjang pendidikan yaitu Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wustho, dan Madrasah Diniyah 'Ulya. Madrasah jenis kedua adalah madrasah, sekolah yang berciri khas agama Islam. Madrasah ini terdiri dari tingkatan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Programnya sama dengan sekolah, hanya saja diberikan bobot pendidikan agama yang lebih banyak dibanding dengan sekolah negeri. Sedangkan madrasah jenis ketiga adalah madrasah keagamaan, yakni madrasah pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan (Daulay, 2001, p. 62).

Penerapan manajemen dalam madrasah akan mencakup tujuh komponen madrasah sebagaimana yang terdapat dalam sekolah. Selain tujuh komponen di atas Mansur Muslich menambahkan enam komponen lain dari komponen sekolah/madrasah yang masuk dalam garapan manajemen madrasah sebagaimana yang dikutip oleh Jaja Jahari, yaitu: mutu madrasah, kepemimpinan madrasah, kebijakan madrasah, inovasi madrasah, supervisi madrasah, dan pemasaran jasa pendidikan pada madrasah (Syarbini, 2013, p. 15). Baik dan buruknya pengelolaan terhadap

komponen-komponen madrasah di atas juga akan mempengaruhi kualitas input, proses dan output dalam madrasah

B. Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma naturalistik yang secara filosofis mengacu kepada post-positivisme *phenomenology* (Muhadjir, 2002, p. 17). Tahap selanjutnya setelah diperoleh deskripsi tentang realitas dan ragam pengelolaan kelembagaan dan pembelajaran MA adalah merumuskan model sebagai bentuk inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan agama Islam. Secara metodologis pendekatan yang dipilih untuk tujuan tersebut adalah dengan model *social action*, dimana peneliti terlibat langsung dan menyatu dengan subyek penelitian dalam berbagai aktivitas madrasah dan berpartisipasi aktif (Muhadjir, 2002, pp. 202–203). Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kudus dengan subjek terkait dengan realitas kelembagaan, implementasi kurikulum, pembelajaran dan sumber daya manusia MA di Kudus. Data penelitian akan digali melalui dua tahap sebagai berikut, yaitu; (1) *data collection from human sources*, dan (2) *data collection from non-human sources*. (Guba, 1985, p. 267). Untuk sumber data jenis pertama teknik yang digunakan meliputi: observasi, wawancara, angket, *discourses* melalui pemberian *text reading*, ceramah dan diskusi. Sedangkan untuk jenis data yang kedua teknik yang digunakan adalah dokumentasi. Kemudian Untuk menjamin agar data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka mutlak perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data (*trustworthiness*), melalui 1) *credibility* - derajat kepercayaan; 2) *transferability* - keteralihan; 3) *dependability* –kebergantungan; dan 4) *confirmability* - kepastian. (Guba, 1985, p. 268) Hasil yang diperoleh pada tahap ini berupa catatan lapangan (*fieldnote*) atau *fieldwork*. Dari sudut substansinya hasil analisis pada tahap ini berupa kesimpulan sementara atau hipotesis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan kajian dokumen dengan menggunakan model analisis induktif. (Guba, 1985, p. 202) Data (kesimpulan) yang diperoleh pada

analisis tahap pertama selanjutnya dikembangkan pada analisis tahap kedua, yaitu *analysis after data collection*. Pada tahap ini semua data dianalisis secara induktif dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan berbagai penguatan pendididkan Islam pada Madrasah Aliyah di Kudus.

1. Tipologi Madrasah Aliyah di Kudus

Jumlah keseluruhan MA yang ada di Kudus ada 36, 2 diantaranya berstatus negeri, selebihnya adalah MA yang lahir dan berkembang atas prakarsa dan inisiatif masyarakat. Dari 2 MA berstatus negeri itupun salah satunya (MAN 1 Kudus) melalui proses penegerian, artinya awal kelahirannya adalah atas prakarsa masyarakat. Sementara yang lainnya adalah (MAN 2 Kudus) hasil konversi dari PGAN Kudus. Sebagai lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, maka visi dan cita-cita para tokoh pendiri MA swasta tersebut sangat mempengaruhi arah dan perkembangan MA tersebut. Hal penting terkait dengan para tokoh tersebut adalah latar belakang para tokoh pendiri suatu MA. Latar belakang yang dimaksud di sini adalah latar belakang pendidikan dan profesi/ kedudukan sosial para tokoh tersebut di masyarakat. Hampir semua MA swasta di Kudus didirikan atas prakarsa tokoh agama (ulama') dan tokoh masyarakat pada tingkatan masing-masing. Semakin tinggi tingkat ketokohan (popularitas) para pendiri akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke suatu MA. Aspek ketokohan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat adalah tingkat ke-*ulama'*-an tokoh pendiri.

Hampir semua MA swasta di Kudus yang didirikan sebelum tahun 1989 tokoh pendirinya adalah para kyai (ulama') besar di Kudus, dengan latar belakang pendidikan pesantren, rata-rata memiliki pondok pesantren atau setidaknya memiliki forum pengajian tetap (*majlis ta'lim*) di masjid atau musholla. Latar belakang pendidikan pesantren inilah yang mewarnai visi akademik/keilmuan yang dikembangkan dalam kurikulum MA. Karena terlalu banyaknya ilmu agama yang diberikan, MA jenis ini lebih mirip dengan pesantren dibanding madrasah. Sedangkan MA yang berdiri setelah tahun 1989 sebagian besar didirikan

oleh tokoh masyarakat (bukan kategori kyai/ulama') yang peduli terhadap pendidikan (Islam), bahkan beberapa di antara para tokoh pendiri MA ini adalah para pamong/perangkat desa. Meskipun demikian proses pendiriannya tetap melibatkan peran para ulama'/kyai lokal. Ditinjau dari kemampuan manajemen, kekuatan MA di Kudus dapat dikelompokkan menjadi maju, sedang, dan kurang. Indikatornya: 1) ketersediaan dan kecukupan infrastruktur kependidikan, 2) ketersediaan dan kecukupan tenaga pendidik sesuai kualifikasi dan kompetensi, dan 3) jumlah peserta didik. Ketiga faktor tersebut, faktor jumlah peserta didik menjadi dominan dan determinan dalam menentukan faktor pertama dan kedua. Semakin banyak jumlah siswa maka akan semakin tercukupi infrastruktur kependidikan dan terpenuhi jumlah guru yang dibutuhkan.

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan, ada perbedaan signifikan antara MA negeri dan MA swasta dalam memahami dan memaknai ciri khas Islam. Untuk MA negeri implementasi ciri khas Islam diwujudkan dalam bentuk penjabaran rumpun PAI menjadi lima mata pelajaran, sedangkan untuk MA swasta penjabaran PAI menjadi lima mata pelajaran tersebut dianggap belum mampu mewujudkan jati diri dan roh MA sebagai lembaga pendidikan Islam. Oleh karenanya, perlu penambahan atau bahkan perombakan komposisi PAI tersebut dan melengkapinya dengan beberapa ilmu pendukung yang relevan (*ilmu alat*) yang dibutuhkan untuk kepentingan memahami teks sumber ajaran (al-Qur'an dan al-Hadith) dan berbagai kitab klasik yang relevan. Atas dasar pertimbangan inilah maka di beberapa MA yang berorientasi kuat ilmu-ilmu agama Islam materi dan sistem pembelajarannya hampir sama dengan pesantren. Hal ini berbeda dengan MA negeri yang sama dengan SMA, bila ada perbedaan hanyalah sedikit yaitu pada penjabaran PAI.

Berangkat dari realitas implementasi ciri khas Islam sebagaimana tercermin kegiatan inti kependidikannya (kurikulum/standar isi dan kompetensi lulusan/standar kompetensi lulusan), MA di Kudus penulis kelompokkan kedalam empat tipologi. Empat tipologi MA tersebut meliputi: (1) MA sebagai SMU berkarakter agama, (2) MA berkarakter pesantren,

(3) MA berkarakter Pengayaan Agama, dan (4) Pesantren dengan madrasah formal.

2. Paradigma Baru Madrasah Berbasis Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan “tradisional”, memiliki kelebihan dalam hal kemengakaran pada tradisi Islam. Kemengakaran ini terdapat pada pendasaran pendidikan Islam kepada keilmuan Islam klasik, yang merujuk pada pembelajaran mendalam atas sumber utama teks Islam: al-Qur’an dan al-hadist (Mastuhu, 1994, p. 70). Pembelajaran mendalam atas dua sumber utama ini dipraksiskan dalam operasionalisasi nilai-nilai Islam melalui pembelajaran atas bidang-bidang keilmuan yang menjadi dasar-dasar keagamaan (*ushul al-din*). Dasar-dasar ini merujuk pada pembelajaran atas *fiqh* beserta *ushul* dan *qawa'id al-fiqh*, tafsir dan *ulum al-h}adist*, ilmu kalam, dan tasawuf. Guna mencapai pembelajaran maksimal atas *ushul al-din* ini, pesantren kemudian memperkuat santri dengan penguasaan atas *ilmu-ilmu 'alat*, yang mencakup ilmu bahasa Arab (*nahwu, sharaf, balghah*), *mantiq*, serta kebiasaan pemaknaan kitab kuning baik melalui metode *sorogan* maupun *bandongan* (Mastuhu, 1994, p. 61).

Sayangnya segenap kelebihan ini masih terbayangi oleh kelemahan sistem pendidikan pesantren, yang membuat pemerintah Indonesia mendaulat madrasah sebagai sistem pendidikan Islam yang resmi. Kelemahan ini terletak pada kurangnya manajemen modern di dalam tata pendidikan, yang mengacu pada sistem administrasi kurikulum dan penataan institusional berbasis birokrasi (Sirozi, 2005, p. 64) Dengan kurangnya sistem administrasi ini, maka pendidikan pesantren (klasik) cenderung bersifat kultural: santri belajar karena ingin menjadi muslim yang baik, dan bisa mengajar menjadi ustadz di kampungnya, ketika ia lulus *mesantren*. Materi pelajaran yang hanya mengacu pada pelajaran Islam klasikpun dianggap terbelakang, karena meminggirkan ilmu-ilmu umum yang dibutuhkan santri untuk menghadapi situasi modern yang menuntut penguasaan sains dan teknologi. Maka, karakter santri sebagai pelajar Islam yang kikuk dengan perkembangan zamanpun terjadi, yang

semakin menyudutkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang ketinggalan zaman.

Berangkat dari kelemahan inilah pemerintah dan praktisi pendidikan kemudian menggagas sistem madrasah, yang merupakan internalisasi sistem pendidikan sekolah ke dalam pendidikan Islam. Artinya, madrasah adalah tipe keislaman dari pendidikan sekolah. Oleh karena itu, paradigma awal madrasah adalah paradigma sekolah. Dengan paradigma ini, sistem pendidikan madrasah secara institusional dan administratif, mengacu pada sistem sekolah. Dengan demikian maka sahlah jika madrasah disebut sebagai pendidikan agama Islam. Yakni sistem pendidikan yang mengajarkan agama Islam. Bukan sistem pendidikan menurut Islam. Mengapa? Karena paradigma dan sistem pendidikan madrasah adalah sekolah. Di titik inilah kita menjadi *mafhum* kenapa definisi madrasah adalah sekolah umum berciri khas Islam. Jawabnya jelas: madrasah adalah salah satu bidang pendidikan sekolah yang konsen dengan pengajaran ilmu-ilmu keislaman.

Tentu hal ini memiliki kelebihan, karena sistem sekolah dengan manajemen institusional dan administrasi kurikulum, telah membuahkan sistem pendidikan modern yang tertata rapi dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Keberadaan ilmu-ilmu umum yang mendampingi ilmu-ilmu keislaman, membuat pelajar madrasah bisa mempelajari dua corak keilmuan sekaligus, sehingga mereka tidak kikuk dengan kondisi masyarakat yang serba saintifik dan teknologis.

Berangkat dari kelemahan dan kelebihan tersebut, perlu dilakukan sintesis yang mengarah pada pembentukan suatu sistem pendidikan madrasah berbasis pesantren. Hal ini dilatari oleh beberapa hal. *Pertama*, sistem pendidikan yang resmi adalah madrasah. Oleh karena itu, pengembangan dan perbaikan sistem pendidikan Islam haruslah beranjak dari sistem madrasah. *Kedua*, secara institusional, madrasah memang memiliki kelebihan dibanding pesantren, yakni dalam tata administrasi dan birokrasi pendidikan. Hal ini merupakan pengelolaan modern atas sistem pendidikan, yang membuat sistem madrasah terukur, jika dibanding dengan pola pesantren yang lebih bersifat

kultural. *Ketiga*, pesantren di sisi lain memiliki kelebihan yang bisa menyempurkan sistem pendidikan Islam di madrasah. Kelebihan ini terletak pada sistem pendidikannya yang mengakar pada tradisi keilmuan Islam dan tradisi dari peradaban Islam itu sendiri. *Keempat*, dengan demikian, upaya penyempurnaan pendidikan Islam kita haruslah mengarah pada pendasaran kembali sistem pendidikan Islam kepada tradisi Islam, meskipun tetap dengan tata kelola institusional ala madrasah. Di dalam proses penyempurnaan ini, tentu ada hal-hal dari madrasah yang dikurangi. Upaya ini merupakan usaha untuk mendedominasi sistem sekolah atas pendidikan Islam. Salah satunya melalui penambahan mata pelajaran keilmuan Islam, sehingga pelajaran Islam tidak lagi minimalis, melainkan maksimalis.

Memang di satu titik telah terjadi persilangan antara madrasah dan pesantren. Hal ini terjadi pada pesantren yang mendirikan madrasah di dalamnya. Serta madrasah yang memiliki sistem nilai dan kurikulum pesantren. Pada yang pertama, pesantren telah menyempurnakan diri sehingga mau memasukkan pola sistem sekolah ke dalam sistem pendidikan tradisional. Hal ini tentu menggugurkan tesis keterbelakangan pesantren. Hal sama terjadi pada madrasah yang telah mengadopsi sistem nilai dan kurikulum pesantren. Dalam kaitan ini, madrasah telah menyempurnakan diri melalui pesantrenisasi sistem pendidikannya.

3. Penguatan Pendidikan Agama Islam

Nilai positif (kelebihan) pesantren dapat terwujud karena, pesantren merupakan sub-kultur yang berbeda namun mempengaruhi budaya kebanyakan. Sub-kultur pesantren mengacu pada tiga keunikan; tingkah laku, tata nilai, dan hirarki kepemimpinan. Keunikan pesantren tersebut terletak pada dua hal; (1) pengaturan waktu kegiatan, dan (2) struktur pengajaran. Ciri sub-kultur selanjutnya dari pesantren adalah tata nilai dan pandangan hidup khas, yang berasal dari cara hidup unik di atas. Visi untuk mencapai penerimaan di sisi Allah dihari kelak menempati kedudukan terpenting dalam tata nilai di pesantren. Dalam terminologi pesantren, visi ini disebut *keikhlasan* dengan

satu terma “pandangan hidup *ukhrawī*”. Pada titik inilah, *asketisme* (*al-zuhūd* atau kealiman) menjadi dasar dan bentuk kebudayaan masyarakat pesantren.

Dilihat dari perspektif sistem pendidikan pesantren, dehumanisasi (Mulkhan, 2002, p. 66) sesungguhnya telah terjadi dalam sistem pendidikan persekolahan, dimana sekolah kita *cenderung* mengarah pada pemupukan kemampuan praktis yang menempatkan ilmu sebagai *skill* (keahlian). Memang, *skill* merupakan indikator utama seseorang telah menguasai atau tidak, satu disiplin ilmu. *Skill* juga menjadi modal intelektual agar seorang terdidik mampu masuk dalam jalinan spesialisasi dari masyarakat modern. Ya, masyarakat modern adalah masyarakat terpresialisasi, karena ia mengarahkan gerak hidup kemasyarakatan kepada derap industri. Dalam industri, seorang yang paling spesialislah, yang paling dibutuhkan untuk menempati pos-pos sosio-ekonomi yang juga spesialis. Hal ini penting karena dengan spesialisasi, masyarakat modern bisa semakin profesional di dalam mengolah sumber-daya kehidupan. Hanya saja, spesialisasi pendidikan ini kemudian membukakan jurang lebar antara sistem dengan dunia-kehidupan. Satu hal yang akhirnya menambatkan perahu pendidikan di muara pencetakan tenaga kerja. Jadi pendidikan akhirnya menjadi pelatihan kerja. Tujuannya bukan pengasahan budi, melainkan keterampilan kerja. Hal inilah yang kemudian mengarahkan pendidikan tidak sebagai penyempurnaan gerak kemanusiaan, melainkan pengasahan alat-kerja demi pemenuhan kebutuhan hidup.

Pada titik inilah madrasah sebenarnya diharapkan menutup “lubang hitam” pendidikan kita, dengan menggerakkan nuansa keislaman di sistem sekolah. Namun madrasahpun kurang bisa memaksimalkan potensi keislaman tersebut, karena pada level sistem, ia masih terkonstruksi dalam paradigma sekolah yang memiliki kelemahan fundamental tersebut. Hal ini terjadi karena dalam madrasah ada dua kurikulum, yakni kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum lokal madrasah. Dualisme kurikulum inilah yang membuat madrasah tidak bisa memaksimalkan potensi keislaman. Selain dualisme ini, sistem pendidikan, baik menyangkut metode pengajaran guru, standar penilaian, dan

capaian akhir pendidikan, yang masih mengekor pada sistem sekolah. Dari sini jelas terlihat, bahwa madrasah *an sich* tidak bisa diharapkan menjadi penyempurna sistem pendidikan kita yang penuh kelemahan. Perlu ada terobosan radikal yang memijakkan konsep, sistem, dan praktik pendidikan pada ranah filosofis dari pendidikan itu sendiri, yang merupakan usaha manusia untuk memanusiakan dirinya.

4. Model Penguatan Madrasah Berbasis Pesantren

Konsep Madrasah Berbasis Pesantren merupakan adopsi nilai dan sistem pesantren dalam pengelolaan MA sebagai "sekolah umum" dengan Islam sebagai "ciri khasnya". Tujuan dari konsep ini adalah dalam rangka penguatan atas berbagai kekuangan yang terjadi pada MA, terutama bidang PAI. Merujuk pada Standar Isi (SI) dan Standar Kelulusan (SKL), perbedaan antara MA dan SMA adalah terletak pada tujuan dan cakupan materi PAI. Tujuan mata pelajaran PAI di SMA adalah: (1) memberikan wawasan terhadap keberagaman agama di Indonesia, (2) meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa. Karena rumusan tujuannya yang lebih simpel (global), maka PAI untuk SMA diberikan secara global dalam satu mata pelajaran. Berbeda dengan SMA, karena Islam menjadi ciri khasnya maka komposisi PAI untuk MA menjadi lebih banyak (mata pelajaran dan alokasi waktu) dan pembahasannya lebih mendalam dalam rangka mencapai tujuan spesifiknya. Sebagai sub-sistem pendidikan nasional, ada tiga tujuan yang harus di capai oleh MA, yaitu: (a) tujuan pendidikan nasional, (b) tujuan pendidikan menengah, dan (c) tujuan spesifik pendidikan MA.

Karena mengadopsi nilai dan sistem pesantren maka operasional kegiatan madrasah menerapkan model *boarding school* (asrama) dengan mengadopsi konsep sistem "pondok" atau pemonudukan bagi para santri sebagaimana telah lama diterapkan dalam sistem pendidikan pesantren. Unsur esensial yang diadopsi dari sistem ini adalah pada aspek sistem *full days school*, dimana proses belajar mengajar bisa dilaksanakan tidak hanya pada aspek kurikulum formal saja tetapi juga pada aspek *hidden curriculum*.

Dengan mengadopsi sistem pesantren ini, secara umum ada empat hal penting yang dapat dicapai atau diperoleh secara simultan oleh MA dalam kapasitas dan statusnya sebagai sekolah menengah umum berciri khas Islam. Capaian ini sekaligus merupakan keunggulan dan kelebihan MA bila dibandingkan dengan SMA atau pendidikan Islam tradisional lainnya. Bila hal ini dapat diwujudkan, maka akan tercipta produk (*output – outcome*) dari proses pendidikan di MA yang sesuai dengan ekspektasi para penggunanya. Empat hal tersebut meliputi: (1) penguatan atau pendalaman *'ulum al-din* sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keberagaman peserta didik. (2) Pendalaman materi *science* (mata pelajaran umum) sebagai upaya untuk mencapai keunggulan komparatif sejalan dengan arus besar kebijakan pendidikan nasional. (3) Pemberian latihan ketrampilan untuk memberi bekal *life skill* sebagai bekal bagi lulusan untuk terjun dalam kehidupan bermasyarakat dengan keunggulan kompetitif. (4) Optimalisasi kegiatan ekstra dalam rangka mewujudkan "pendidikan yang dijiwai dengan suasana keagamaan". Adapun model yang dilahirkan dari paradigma madrasah berbasis pesantren adalah:

Pertama Madrasah Pesantren (MP) adalah model pengelolaan MA, dimana secara operasional pengelolaan antara madrasah dan pesantren berada dalam satu sistem manajemen. Artinya, suatu MA tidak hanya secara fisik berada dalam lingkungan pesantren tetapi antara MA dan pesantren berada dalam satu struktur organisasi dan manajemen yang menyatu (*integrated*). Tujuan dari penyatuan sistem pengelolaan ini adalah agar semua proses pendidikan berada dalam suatu sistem yang memungkinkan semua kegiatan guru dan murid berada dalam satu alur dan paket program yang sama. Dari tiga model yang peneliti tawarkan, model ini yang paling ideal untuk sebuah proses pendidikan, tidak hanya untuk pendidikan Islam (madrasah) saja tetapi juga untuk semua lembaga pendidikan pada umumnya. Dengan sistem atau model ini akan tercipta proses pendidikan holistik yang akan melahirkan *output* dan *outcome* pendidikan berkualitas. Seperti telah diuraikan pada kerangka konsep di atas, pada MP ada tiga aspek penting yang memungkinkan

berlangsungnya proses pendidikan di MA yang berorientasi pada kualitas, yaitu aspek pengelolaan, aspek kurikulum dan aspek suasana keagamaan.

Kedua Madrasah Lingkungan Pesantren (MLP), madrasah yang berada di lingkungan Pesantren yang disingkat MLP ini secara substantif memiliki kesamaan dengan model yang pertama, perbedaannya hanyalah terletak pada keberadaan pesantren secara fisik. Bila pada model pertama MA dan pesantren berada dalam satu sistem pengelolaan dan dalam satu kompleks pendidikan, untuk model yang kedua antara MA dan pesantren tidak berada dalam satu sistem manajerial. Pesantren yang di maksud disini adalah pesantren yang secara fisik berada dalam satu kawasan atau lingkungan di sekitar lokasi MA. Model ini sekaligus menjadi alternatif bagi MA yang memiliki keterbatasan dalam penyiapan infrastruktur. Karena berada di luar manajemn dan tidak berada dalam satu komplek pendidikan, langkah yang bisa ditempuh oleh para pengelola MA adalah dengan mengadakan kerja sama dengan pihak pengelola/pengasuh pesantren dalam hal materi (ilmu agama) yang diajarkan di pesantren. Oleh karenanya, dari sudut pengelolaan kelembagaan model MLP ditempuh melalui kerjasama antara manajemen madrasah pada satu pihak dan manajemen pesantren pada pihak lain. Dengan kerja sama ini diharapkan sistem dan materi pendidikan yang diajarkan di pesantren bisa sejalan dan mendukung tema-tema yang diajarkan di MA.

Dari sudut materi atau bahan yang diajarkan, rumusan verbalnya bisa jadi antara apa yang diajarkan di madrasah dan di pesantren berbeda. Namun substansi isi bahan yang diajarkan ada titik temu. Meskipun dari sudut kelembagaan antara madrasah dan pesantren merupakan unit organisasi atau lembaga yang berbeda, namun pembelajaran di pesantren didesain dalam rangka penguatan (*empowering*) terhadap materi yang diajarkan di madrasah. Karena berbeda lembaga maka antara keduanya hubungannya bersifat koordinatif dalam rangka menjalin sinergi demi menghindarkan terjadinya ketidaksesuaian isi dari materi pembelajaran. Karena merupakan unit organisasi yang berbeda, maka model pmanajemen/kepemimpinan antara madrasah

dan pesantren tidak harus menyatu, karena untuk menyatu membutuhkan biaya infrastruktur yang mahal. Akan tetapi antara madrasah dan beberapa pesantren yang berada di lingkungannya ada kerjasama dan koordiniasi.

Ketiga Madrasah Sistem Nilai Pesantren (MSNP), konsep model ketiga ini didasarkan atas asumsi bahwa sistem pendidikan pesantren dengan meteri dan budayanya dipandang cocok atau sesuai dengan karakter MA, terutama dalam mewujudkan ciri khas Islam. Sebagaimana diketahui, pada pesantren ada unsur-unsur yang secara kultural sejalan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan dengan ciri khas Islam. Seperti keberadaan kiai sebagai figur panutan, masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan dan ibadah, pengajaran kitab kuning sebagai sumber pengetahuan agama Islam, dan asrama sebagai media penciptaan suasana sosial keberagaman, lengkap dengan kondisi lingkungan pesantren sebagai sub kultur masyarakat sekitar. Untuk mempermudah dan memperjelas anatomis unsur-unsur lingkungan madrasah dan pesantren serta adopsi sistemik dari sistem nilai dan tradisi pesantren, maka berikut akan penulis gambarkan dalam bentuk skema. Sebagaimana dua model Penguatan Pendidikan Agama (PAI) Bebas Pesantren sebelumnya, maka model ketiga ini juga memiliki tiga aspek pokok sebagai komponen yang akan menjadi jelas dalam model dimaksud, yaitu : aspek pengelolaan, aspek kurikulum dan aspek suasana keagamaan

5. Komparasi antar Model Madrasah Berbasis Pesantren Sebagai Model Penguatan PAI Pada Madrasah Aliyah di Kudus

Setelah melakukan elaborasi atas beberapa tawaran model madrasah berbasis pesantren sebagai model penguatan pendidikan agama Islam, maka penulis akan membuat komparasi antar-ketiganya. Tujuannya jelas, yakni mencari kelemahan dan kekuatan antar-model, serta mencari peluang bagi “irisan konseptual” antar-model tersebut guna lebih mendekatkan tulisan ini kepada cita-cita madrasah berbasis pesantren.

Dari uraian ini kita menjadi mafhum mengapa model Madrasah Lingkungan Pesantren (MLP) belum ideal. Karena,

madrasah berbasis pesantren tidak hanya dipahami secara teritorial. Artinya, madrasah berbasis pesantren bukan hanya sekedar persoalan letak madrasah yang secara geografis berada di dalam lingkungan pesantren. Hal ini sudah banyak kita temukan pada lembaga pesantren yang mendirikan madrasah di dalamnya. Motivasi pendirian tersebut sangat beragam, mulai dari motivasi bahwa pesantren memiliki dan menyadari kelemahannya sebagai lembaga pendidikan tradisional, sehingga perlu mendirikan madrasah yang merupakan proto-type dari lembaga pendidikan modern. Oleh karena itu, madrasah sebagai lembaga pendidikan modern, ingin melakukan modernisasi pesantren malalui jalur pendirian lembaga madrasah.

Sementara itu, gagasan madrasah berbasis pesantren justru sebaliknya. Ia merupakan arus balik tradisi, di mana pesantren hendak mengembalikan madrasah ke akar tradisi pendidikan Islam. Jadi ia pertama-tama merupakan kehendak normatif, baru setelah itu menjadi kehendak pedagogis. Artinya, gagasan ini bersifat normatif sebab ia lahir dari keprihatinan normatif akan tercerabutnya madrasah dari nilai kepesantrenan. Cara pikir tersebut, tentu saja telah melampaui kritik pendidikan dan kritik kebudayaan. Dalam kritik ini, tradisi mengarus-balik, mengkritik modernitas, dan hendak mengembalikannya ke dasar tradisi tersebut. Ia menjadi kritik kebudayaan, karena telah melakukan kritik kemasyarakatan yang dibentuk oleh pola modernis dalam sistem pendidikan nasional kita. Tentu madrasah tidak bermasalah dalam dirinya sendiri. Ia memiliki kelemahan, karena ia bagian dari sistem pendidikan formal kita yang banyak memiliki kelemahan. Pada titik ini, MLP tidak memenuhi syarat normatif tersebut, karena ia tidak berangkat dari kritik kebudayaan: kritik tradisi atas modernitas. Oleh karenanya, di dalam MLP, terjadi pemilahan antara madrasah dan pesantren, sehingga keduanya terpisah, baik secara kelembagaan, maupun sistem pendidikan. Yang penulis maksud sebagai kelembagaan di sini berarti kelembagaan pendidikan, sebab bisa saja MLP berada dalam satu lembaga, yayasan misalnya, namun dalam pelebagaan pendidikan, mereka tidak sama, dan tidak menyatu.

Hanya saja, model MLP memiliki nilai positif, dari segi geo-institusional. Artinya, karena secara geografis dan institusional telah menyatu antara madrasah dan pesantren, maka gagasan madrasah berbasis pesantren bisa diwujudkan. Tentu ia memerlukan banyak perubahan mendasar, seperti perubahan paradigma pendidikan Islam, perubahan pedagogis, perubahan kurikulum, dan perubahan lingkungan khusus untuk lingkungan pendidikan. MLP telah memilikinya sebab sebagian besar murid madrasah pastilah pula santri pesantren tersebut. Hanya saja tidak mudah untuk melakukan perubahan paradigma yang berdampak pada perubahan pedagogi. Ia terkait dengan pola pikir masyarakat yang sudah begitu mapan, serta sistem pendidikan nasional yang begitu stabil. Makanya, gagasan madrasah berbasis pesantren ini selain bersandar pada kesadaran dan pergerakan dari masyarakat madrasah-pesantren. Juga terkait dengan perjuangan struktural dalam perombakan sistem pendidikan madrasah, agar bersedia menjadikan kepesantrenan sebagai basis pendidikan Islam secara nasional.

Sementara itu, untuk madrasah sistem nilai pesantren (MSNP) persoalannya agak beda. Model inipun hampir sama dengan MLP. Ia memiliki kelemahan juga kekuatan. Jika MLP kekuatannya terletak pada kesatuan fisik antara madrasah dan pesantren. Sementara dalam MSNP, kekuatannya terletak dalam terdapatnya sebagian sistem nilai pesantren di madrasah.

Kelemahan yang terdapat di MSNP ialah belum bersatunya pesantren dan madrasah secara kelembagaan, dengan pesantren sebagai basis kulturalnya. Sebab secara manajerial pendidikan, MSNP sangat potensial bagi gagasan madrasah berbasis pesantren tersebut. Manajemen pendidikan MSNP telah mengacu pada kurikulum pendidikan pesantren. Hal ini cukup sebagai modal bagi gagasan madrasah berbasis pesantren. Maka untuk MSNP, langkah menuju madrasah berbasis pesantren tinggal setahap. Yakni penyatuan institusional antara madrasah dan pesantren. Tentu hal ini membutuhkan biaya besar, jika dibanding dengan MLP, sebab secara fisik, MSNP haruslah mendirikan pesantren di dalam lingkungan madrasah, sebagai basis kultural bagi pendidikan madrasah.

C. Simpulan

Desain Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Aliyah di Kudus didasarkan kepada spirit dan nilai kepesantrenan sebagai bagian utama dari tradisi Islam dan sekaligus memenuhi kualifikasi standar nasional pendidikan. Madrasah saat ini, cenderung kehilangan jati diri kemadrasahannya yang sesungguhnya menjadi pembeda dengan sekolah. Bukti tentang ini dapat dilihat struktur dan komposisi kurikulum yang minimalis untuk Pendidikan Agama Islam (PAI).

Meskipun demikian, Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajarannya menerapkan dan berpedoman pada kurikulum nasional Departemen Agama dan implementasinya memiliki karakteristik dan orientasi akademik yang berbeda antara satu madrasah dengan lainnya.

Secara substantif, Penguatan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Aliyah dengan basis Pesantren, bisa disebut sebagai realitas konseptual. Artinya, gagasan ini bersifat konseptual. Sehingga apa yang disebut sebagai Madrasah Berbasis Pesantren bisa saja tidak menjadikan kesatuan kelembagaan antara madrasah dan pesantren. Madrasah Berbasis Pesantren lahir dari krisis konseptual pendidikan Islam madrasah yang semakin jauh dari sistem nilai dan kultur pendidikan Islam salafi dan berikhtiar menawarkan solusi konseptual. Salah satu wujud dari sifat konseptual Madrasah Berbasis Pesantren adalah perumusan ulang kurikulum madrasah dengan menggunakan standar kurikulum pesantren.

Sebagai konsep penguatan, Madrasah Berbasis Pesantren secara otomatis meniscayakan reformasi kelembagaan. Artinya, satu sisi Madrasah Berbasis Pesantren menyatu dengan pesantren secara integral (MP), bersinergi dengan pesantren sekitar (MLP) maupun dengan mengadopsi sistem nilai dan kultur pesantren (MSNP).

Dengan demikian, maka pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya disebut sebagai sistem sekolah berciri khas Islam. Akan tetapi madrasah berciri khas pesantren. Artinya, sistem pendidikan

Islam memang bisa disamakan dengan sekolah, akan tetapi hanya pada level teknis manajerial. Secara substantif, ia berbeda dengan sekolah, sebab Islam sebagai sistem pendidikan memiliki konsepnya sendiri. Untuk itu, pendidikan Islam di Indonesia harus ditingkatkan dari sistem sekolah berciri Islam, menjadi sistem madrasah berciri pesantren. Dengan cara ini, maka pendidikan Islam bisa lebih memiliki kekhasan, yakni kepesantrenan. Kekhasan keislaman yang dirumuskan oleh Kemenag RI terbukti masih bersifat permukaan. Ia tidak menghunjam hingga ke dasar peradaban dan tradisi Islam. Dengan menjadikan pesantren sebagai basis pendidikan Islam, maka pendidikan Islam kita bisa betul-betul mengakar pada tradisi keislamannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2003). *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos.
- Daradjat, Z. (1999). *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Daulay, H. P. (2001). *Historisitas dan Eksistensi: Pesantren, sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dhofier, Z. (1990). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Guba, E. G. & L. (1985). *Naturalistic inquiry*. California: Sage Publications Inc.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Muhadjir, N. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulkhan, M. (2002). *Nalar Spiritual Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mulyasa, E. (2005). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sirozi, M. (2005). *Politik Pendidikan; Dina mika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraa n Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- SM., I. (2011). *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM*. Semarang: Rasail.
- Syarbini, H. A. (2013). *Manajemen Madrasah, Teori, Strategi Dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.